

## MEDIA DAN DEMOKRASI DI ERA GLOBAL: STUDI DAKWAH ISLAM KONTEMPORER DI INDONESIA

Farida Rachmawati  
Pesantren Raudloh al-Tobiriyah Kajen Pati  
faridarachmawati08@gmail.com

### **Abstract**

*Globalization has affected all the cultural subsystems of today's society, especially in media. How Islamic da'wa opportunities in the midst of media globalization is the focus of this article. Library studies have been used in this study. The result shows that Islamic da'wa is in the marginal position and has not been able to become a major player. There are four opportunities that can be used in preaching Islam in the era of media globalization. First, the freedom of information media is filled with enhancing creativity in making Islamic content more interesting and reflecting Islam's rahmatan lil 'alamin. Secondly, Islamic missionary media participated in the formation of public opinion. Third, the education of Muslims based on morality. Muslims must be faithful to the teachings of religion and consistent with the religious ideal. Fourth, to maximize the source of Islamic capitalism such as zakat, as a tool to achieve the welfare of all people.*

**Keywords:** *Islamic da'wa; globalization; media.*

### **Abstrak**

Globalisasi telah memengaruhi semua subsistem budaya masyarakat saat ini, terlebih di bidang media. Bagaimana peluang dakwah Islam di tengah globalisasi media merupakan fokus dari artikel ini. Studi kepustakaan telah digunakan dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa posisi dakwah Islam berada di posisi terpinggirkan dan belum mampu menjadi pemain utama. Terdapat empat peluang yang bisa digunakan dalam berdakwah Islam di era globalisasi media. Pertama, kebebasan media informasi diisi dengan meningkatkan kreativitas dalam membuat konten-konten Islami yang lebih menarik dan mencerminkan Islam *rahmatan lil 'alamin*. Kedua, media dakwah Islam ikut serta menjadi pemain dalam

pembentukan opini publik. Ketiga, pendidikan umat Islam berbasis moralitas. Muslim harus setia pada ajaran agama dan konsisten terhadap idealitas agama. Keempat, mendayagunakan secara maksimal sumber kapitalisme Islam seperti zakat, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat.

**Kata kunci:** dakwah Islam; globalisasi; media.

## **Pendahuluan**

Kondisi perubahan politik sebagai akibat runtuhnya rezim komunisme (paska runtuhnya Uni Soviet) dan perkembangan ekonomi internasional telah membawa perubahan mendasar dalam tata kehidupan politik global.<sup>1</sup> Paska globalisasi, kemudian muncul wacana-wacana baru yang mendunia dan memengaruhi kesadaran warga dunia dalam berbangsa dan bernegara. Wacana tersebut meliputi pelaksanaan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, perbaikan standar perburuhan, peningkatan peran perempuan, dan pemberantasan korupsi serta penekanan etika moral untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*clean government*). Dengan demikian globalisasi mempercepat proses demokratisasi di suatu negara dengan segala desakan yang ditimbulkannya.<sup>2</sup>

Keterkaitan globalisasi dengan komunikasi, dilihat dari kontribusinya dalam tiga cara sebagaimana yang disebutkan Rantanen (1999) dalam Rianto. *Pertama*, komunikasi global menyediakan infrastruktur bagi aliran data, berita, dan citra lintas batas negara bangsa yang memungkinkan pan-kapitalisme berkembang. *Kedua*, komunikasi global telah mendorong peningkatan permintaan melalui periklanan global (*channel desire*). *Ketiga*, komunikasi global memberdayakan kelompok-kelompok marginal (*the silent voices*) di negara periferi akan hak menentukan nasib sendiri (*self determination*) dan

---

<sup>1</sup> Elza Peldi Taher, ed., "Kata Pengantar," in *Demokratisasi Politik, Budaya, Dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1994).

<sup>2</sup> FX. Aji Samekto, "Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi, Dan Globalisasi: Kajian Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).

keadilan sosial yang biasanya hadir dalam bentuk pemujaan mendalam atas identitas *vis-à-vis* komoditas di negara-negara *center*.<sup>3</sup>

Kondisi dunia yang telah melaju dalam globalisasi dan demokrasi berpengaruh pada media. Sebab, pada dasarnya kondisi di dunia nyata memengaruhi media massa, dan ternyata keberadaan media massa juga dapat memengaruhi kondisi nyata di dunia. Saling pengaruh ini semakin lama semakin kuat. Media massa tidak tumbuh atau berfungsi dalam ruang hampa udara. Media massa muncul, berkembang, berubah, dan kadang-kadang sekarat, sebagai akibat dari pengaruh geografis, teknologi, ekonomi, budaya, dan kekuatan-kekuatan lain yang ada di sekitarnya.<sup>4</sup>

Pengaruh globalisasi terhadap media bisa dilihat dari perkembangan yang terjadi di Indonesia. Indonesia cukup merasakan dampak perkembangan global. Apalagi Indonesia disorot secara negatif karena dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup serius di Timor Timur. Tidak adanya kebebasan pers, yang merupakan pilar demokrasi dan rendahnya upah buruh, dan lain sebagainya. Setelah itu, di tengah kritik gencar atas kasus Timor Timur, atas keputusan presiden didirikanlah Komnas HAM yang memantau hak asasi manusia. Banyak pihak pesimis akan bisa berfungsi melihat kedudukannya dan kredibilitas orang di dalamnya. Indonesia juga telah menaikkan upah buruh, melonggarkan kebebasan pers, dan melepaskan banyak tahanan politik.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai negara kesatuan dengan mayoritas penduduk muslim perlu mengakomodir peranan dakwah Islam dalam proses berdemokrasi. Apalagi nilai dalam dakwah Islam tidaklah bertentangan dengan nilai demokrasi. Menjadi penting untuk bisa membaca peluang dakwah Islam dalam globalisasi dan demokrasi media.

## Globalisasi Media

Definisi globalisasi menurut Giddens, ialah *“As the intensification of world-wide social relations, which link distant localities in such a way that*

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> William L. Rivers, T. Peterson, and J.W. Hensen, *Media Massa Dan Masyarakat Modern (Mass Media and Modern Society)*, ed. Haris Munandar and Dudy Priatna (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>5</sup> Taher, “Kata Pengantar.”

*local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa*” Dapat diartikan dengan, menggeliatnya hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas, sehingga peristiwa-peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi jauh di seberang sana dan begitupun sebaliknya.<sup>6</sup>

Menurut Fakih, globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari Perusahaan-perusahaan Transnasional (TNCs/*Trans National Corporations*) dengan dukungan Lembaga-lembaga Finansial Internasional (IFIs -*International Financial Institutions*) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/*World Trade Organization*).<sup>7</sup> Menurut McAnany, globalisasi berarti sebuah proses yang di dalamnya meliputi meningkatnya interkoneksi dunia melalui arus pasar, barang-barang, pelayanan, masyarakat, informasi, dan budaya yang melintas tanpa batas.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik satu kesamaan, bahwa globalisasi merupakan kondisi kehidupan yang segalanya sudah tersambung tanpa batas. Terlepas apakah nantinya keberadaan globalisasi berdampak positif atau negatif tergantung perspektif individu yang membacanya. Namun yang perlu digaris bawahi adalah kata “*market*” atau pasar, yang bisa jadi berarti sebuah ideologi atau cara tersendiri bagaimana nantinya globalisasi merasuk dalam sistem negara-negara di dunia dan mempengaruhi kebijakannya.

Kewaspadaan lain globalisasi adalah situasi interkoneksi. Maka negara bangsa yang masuk dalam pusaran globalisasi akan secara otomatis terjadi kesalingbergantungan, tidak ada negara yang bisa mengisolasi dirinya. Kelemahan suatu elemen negara terhadap penetrasi kekuatan global ini bisa melumpuhkan dirinya. Bahkan pelajaran dari negara adikuasa seperti Uni Soviet menjadi korban globalisasi

---

<sup>6</sup> Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity* (Cambridge: Polity Press, 1990).

<sup>7</sup> Mansour Fakih, *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

<sup>8</sup> E.G. Mc Anany, “Globalization and the Media: The Debate Continues,” *Communication Research Trends* 21, no. 4 (2002).

yang didorong temuan-temuan teknologinya sendiri. Berbagai kesulitan ekonomi memaksa pemimpinnya waktu itu, Mikhail Gorbachev, meluncurkan program reformasi. Secara konstan, Soviet kehilangan kekuatan dan kekuasaannya atas Eropa Timur dan ambruk pada 1991.<sup>9</sup>

Di Indonesia globalisasi sudah bisa dirasakan dengan meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet yang mana bisa menjangkau berbagai kalangan, penggunaan televisi berbasis digital yang senantiasa menyajikan berbagai tayangan ala Barat hingga Timur. Di sektor ekonomi merebaknya produk luar negeri di Indonesia dari makanan, busana, hiburan, bahkan hingga serbuan tenaga kerja asing di Indonesia. Selain itu globalisasi meniscayakan kerjasama dengan negara-negara asing, seperti yang sekarang ini terjadi di berbagai pembangunan Indonesia.

Globalisasi merupakan sebuah proses yang berdampak terhadap berbagai ranah kehidupan manusia.<sup>10</sup> Termasuk di dalamnya dampak globalisasi terhadap media. Bahasan yang begitu penting, tetapi tidak banyak yang mengkajinya. Hingga kemudian muncul teori hubungan globalisasi dan media, yang digagas oleh McLuhan dan Fiore (1967) dengan teorinya *'the medium is the message'* dan *'global village'*.<sup>11</sup>

Konsep McLuhan dan Fiore sebenarnya berkaitan dengan efek media. Bila semula media diyakini hanya sebagai saluran (*channel*), kini ia menjadi pesan itu sendiri. Misalnya bagaimana respon audien terhadap pesan yang dikirim melalui medium atau media yang berteknologi. Ternyata, medium juga ikut mengontrol audien dalam menggunakannya.<sup>12</sup> *Global village* atau perkampungan global merupakan sebuah ibarat di mana sekat-sekat antar wilayah tidak lagi berlaku,

<sup>9</sup> Idi Subandy Ibrahim and Bakharuddin Ali akhmad, "Komunikasi Dan Komodifikasi: Mengkaji Media Dan Budaya Dalam," in *Dinamika Globalisasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

<sup>10</sup> S Chinnamai, "Effects of Globalization on Education and Culture," in *ICDE International Conference* (New Delhi: ICDE, 2005).

<sup>11</sup> Terhi Rantanen, *Theorizing Media and Globalization* (London: SAGE Publications, 2005).

<sup>12</sup> Redi Panuju, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

dan masing-masing individu dapat berinteraksi satu dengan yang lain melalui teknologi komunikasi.<sup>13</sup>

Dampak globalisasi yang luas cakupannya, dalam penetrasinya, dan kecepatannya yang instan ini merestrukturisasi cara hidup manusia secara mendalam. Dampak yang ditimbulkannya bersifat medua, atau sering dikenal dengan istilah “global paradox”: memberi peluang dan hambatan, positif dan negatif.<sup>14</sup> Contoh kecil dampak restrukturisasi dalam kehidupan misalnya, ketika jadwal pertandingan sepak bola atau drama Korea memengaruhi jam istirahat seseorang. Sehingga dampak dari berubahnya pola istirahat ini kemudian juga berpengaruh kepada aktifitas seseorang di pagi hari, menimbulkan rasa kantuk yang kemudian berdampak pada penurunan etos kerja individu.

Relasi globalisasi dan media tak bisa dipisahkan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang pada akhirnya mengarah pada kapitalisme global.<sup>15</sup> Hal ini terbukti dengan perkembangan Bhutan, sebuah negara yang pernah menolak globalisasi. Negara terbahagia dengan hanya merasa cukup hanya dengan hasil sawah dan hutan. Saat pertama kali bersentuhan dengan globalisasi, yang ditandai dengan perjanjian kerjasama dengan India pada 1972. Hal yang pertama-tama dikirimkan adalah alat-alat komunikasi, televisi, dan internet. Dampaknya, rakyat Bhutan bisa melihat bagaimana perkembangan di dunia. Melalui televisi, anak-anak muda Bhutan mengenal *fashion* ala Hollywood. Mengetahui musik seperti *rock* dan kecanggihan gawai. Akhirnya gawai juga menjadi salah satu tuntutan kehidupan yang penting untuk dimiliki. Untungnya pemerintah Bhutan menghimbau kepada orang tua untuk tetap menanamkan nilai-nilai tradisional kepada anak-anak. Membatasi pemakaian alat-alat

---

<sup>13</sup> P. Rianto, “Globalisasi Media Dan Transformasi Politik Internasional,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (June 2008).

<sup>14</sup> Ibrahim and akhmad, “Komunikasi Dan Komodifikasi: Mengkaji Media Dan Budaya Dalam.”

<sup>15</sup> Ibid.

modern, dan tetap menghimbau penggunaan pakaian tradisional dengan sedikit sentuhan gaya modern.<sup>16</sup>

### Media dan Kondisi Kebebasannya di Indonesia

Gerak dinamis demokrasi salah satunya digerakkan oleh media. Media adalah saluran atau alat untuk membantu tercapainya tujuan komunikasi. Media dan demokrasi sangat berkaitan erat, mengingat demokrasi meniscayakan adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang bebas. *Freedom of the press*<sup>17</sup> merupakan ungkapan yang sering bergaung di era reformasi sekarang ini. Ungkapan tersebut bukan karya asli bangsa atau masyarakat Indonesia, melainkan dikutip dari Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (AS): “*Congress shall make no law... abridging the freedom of speech, or the press*”, yang artinya kira-kira, “Kongres dilarang menciptakan undang-undang atau hukum yang membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan pers.” Jadi, semangat *freedom of the press* ini sebetulnya sangat khas Amerika (mengingat sejarahnya, sebuah negara yang lahir karena cita-cita kebebasan).

Adapun kondisi kebebasan media di tempat kelahirannya (AS) sendiri mengalami kegamangan. Sebagaimana dalam Rivers, Peterson, Jansen, yang menyebutkan jajak pendapat berskala nasional oleh *Columbia Broadcastig System* (CBS) pada tahun 1970. Jajak pendapat ini sengaja dirancang untuk mengungkap sikap masyarakat terhadap pasal-pasal penting Amandemen Hak Asasi Manusia (*Bill of Rights*) Konstitusi AS. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian penduduk usia dewasa di AS sebenarnya rela beberapa hak dasarnya dibatasi, asalkan ada alasan yang sesuai. Sebagai contoh, 55 persen responden

---

<sup>16</sup> J. Martha, A Bainus, and R.D Haryadi., “Bhutan: Globalisasi, Demokrasi, Dan Tantangan Terhadap Kebahagiaan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2014).

<sup>17</sup> Istilah kebebasan media dan kebebasan pers menurut penulis pada dasarnya sama. Hanya saja di sini dibedakan dengan jenis infotainment. Sebab sejatinya pers menyajikan informasi yang menjadi permasalahan publik. Sedangkan infotainment memproduksi ranah privat menjadi konsumsi publik.

menyatakan bahwa dalam kondisi damai sekalipun, semua koran, radio, dan televisi bisa dilarang untuk menyiarkan berita tertentu yang dinilai oleh pemerintah membahayakan kepentingan nasional.<sup>18</sup>

Meskipun demikian, sebagian hak atau bentuk kebebasan dinyatakan tidak bisa ditawar-tawar. Misalnya, tiga dari empat responden menegaskan bahwa dalam situasi apapun pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan pengadilan secara rahasia (*secret trials*). Kemudian, 66 persen responden menegaskan bahwa polisi tidak boleh masuk ke rumah seseorang tanpa adanya surat perintah penggeledahan dari pengadilan, meskipun polisi mencurigai adanya obat-obatan terlarang, senjata api, atau bahkan bukti kejahatan di rumah itu. Hasil jajak pendapat ini menunjukkan sebagian besar penduduk mengakui pentingnya hak-hak yang dilindungi dalam *Bill of Rights*, namun secara tegas pula mereka menyatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu media massa harus dikontrol.<sup>19</sup>

Di Indonesia, kebebasan pers lahir pada tahun 1999 dengan ditutupnya Departemen Penerangan. Namun kondisi kebebasan tidak semata-mata dan membabi buta meniru Konstitusi AS. Lahirnya UU Pers No. 40 Tahun 1999 juga antara lain didasarkan pada Pasal 19 UU HAM “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”, kemudian Pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan pers pada dasarnya merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat...” Pada intinya, rakyat berhak mendapatkan informasi yang benar dan berhak mengeluarkan pendapat.<sup>20</sup>

Kondisi kebebasan pers di Indonesia merupakan yang terbaik di dunia, bahkan hal ini tidak terdapat di Inggris atau negara maju

---

<sup>18</sup> Rivers, Peterson, and Hensen, *Media Massa Dan Masyarakat Modern (Mass Media and Modern Society)*.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Sirikit Syah, *Membincang Pers, Kepala Negara, Dan Etika Media* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014).



lainnya. Di Inggris, meskipun tampaknya memiliki pers bebas, banyak sekali peraturan yang membatasi pers Inggris. Ahli hukum Article 19, Toby Mendel, dalam sebuah seminar di Oxford tentang *Human's Rights and the Freedom of the Press*, berpendapat bahwa Indonesia lebih memiliki kebebasan pers daripada Inggris dan banyak negara lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan rilis dari pemantau media internasional *Reporters Without Borders*<sup>22</sup> pada tahun 2016, kondisi kebebasan media Indonesia berada di peringkat ke 130 dengan nilai 41,72. Adapun peringkat pertama masih diduduki Finlandia yang bertahan sejak tahun 2012 lalu. Peringkat ini sedikit lebih naik dari pada tahun 2015 yang menduduki peringkat 138. Tetapi masih terhitung rendah jika dibandingkan dengan tahun 2007 yang menduduki peringkat ke 100.<sup>23</sup>

Indeks tersebut salah satu ukurannya memasukkan unsur minimnya kekerasan ataupun ancaman bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Ukuran ini menurut Syah sebenarnya kurang sah. Kebebasan pers mesti diukur dari ada tidaknya aturan-aturan yang membelenggu pers. Indonesia jelas memiliki UU Pers yang menyebutkan, "Pers tak boleh disensor atau diberedel." Baginya, yang pernah bekerja di *The Brunei Times* selama tiga bulan, meskipun tidak ada ancaman atau kekerasan pemerintah, pers di Brunei hanya sekadar corong pemerintah. Bahkan tidak ada rubrik surat pembaca di halaman surat kabarnya. Sebaliknya, menilai pemberitaan tentang media Filipina, di sana banyak terjadi ancaman dan kekerasan terhadap wartawan. Hal itu pastilah disebabkan keberanian wartawan mengungkap kasus dan keterbukaan media menjadi *watch dog* dan melaksanakan kontrol sosial. Dengan demikian, semestinya: semakin

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> JPPN, "Inilah Ranking Kebebasan Pers Indonesia Dari 180 Negara," *Jpnn.Com*, 2015, <https://www.jpnn.com/news/inilah-ranking-kebebasan-pers-indonesia-dari-180-negara>.

<sup>23</sup> Ibid.

banyak terjadi kekerasan atau ancaman kepada wartawan, itu merupakan potret keterbukaan media massa. Mereka memang tak bisa mengatakan apa-apa yang ingin disampaikan.<sup>24</sup>

Regulasi media kini memang telah berbeda jika dibandingkan dengan zaman orde baru (orba). Di era orba, negara menguasai informasi terutama informasi politik. Media cetak yang berani melakukan fungsi kontrol akan diberedel. Setelah bebas dari rezim orba, media kembali terjebak kepada dominasi sektor swasta. Penguasaan media massa oleh sekelompok elit seperti *MNC Grup*, *Kompas Grup*, *Trans Corp* dan para pemodal besar lainnya, akan menghasilkan monopoli di sektor informasi dan penyiaran. Selanjutnya, akan menimbulkan dampak serius terhadap monopoli informasi. Jika ini terjadi, demokratisasi media terancam gagal.<sup>25</sup>

Di sektor media cetak, meskipun tidak menggunakan domain publik berupa frekuensi, semestinya tidak dilepas penuh kepada pengusaha swasta. Harus ada peran negara secara terbatas dalam rangka memproteksi media informasi yang mendidik atau menjaga *diversity of voices*. Hal ini bukan berarti otoriter, tetapi negara melalui Departemen Komunikasi dan Informasi dapat mengambil peran-peran yang lebih fasilitatif. Di Swedia, negara mensubsidi media mikro, media kecil dan komunitas yang menyediakan informasi publik. Untuk *diversity*, negara bahkan membebaskan pajak pembelian kertas untuk media cetak. Sedangkan di sektor penyiaran, Negara seperti melakukan pembiaran (*doing nothing*) atas praktek monopoli yang dilakukan pihak swasta. Merger dan akuisisi terjadi tanpa kontrol. Dalam hal siaran, Komisi Penyiaran masih terlalu lemah dan pasif meskipun regulasi yang ada cukup memadai.<sup>26</sup>

### **Peluang Dakwah Islam di Era Globalisasi Media**

Dakwah sebagaimana yang disarikan Aziz dari berbagai definisi para tokoh menyatakan bahwa, dakwah merupakan proses pening-

---

<sup>24</sup> Syah, *Membincang Pers, Kepala Negara, Dan Etika Media*.

<sup>25</sup> Siregar, *Demokratisasi Media Dan Perubahan Peran Negara: Media, Jurnalisme, Dan Budaya Populer* (Yogyakarta: Prodi Komunikasi UIH dan UIH Press, 2008).

<sup>26</sup> Ibid.

katan iman dalam diri manusia sesuai syariat Islam. “Proses” menunjukkan kegiatan yang terus menerus, berkesinambungan, dan bertahap. Peningkatan adalah perubahan kualitas yang positif: dari buruk menjadi baik, atau dari baik menjadi lebih baik. Peningkatan iman termanifestasi dalam peningkatan pemahaman, kesadaran, dan perbuatan. Sebagai tolak ukur, syariat Islam digunakan sebagai pijakan, di mana hal-hal yang berkaitan dengan dakwah tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan hadis.<sup>27</sup>

Dakwah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bayanuni mencakup tiga hal, yakni penyampaian ajaran Islam untuk seluruh manusia (*tabligh*), memahamkan (*ta’lim / tazkiyah*), hingga penerapan (*tathbiq*) dalam masalah-masalah kehidupan. Dari pengertian yang dipaparkan oleh Aziz dan al-Bayanuni di atas, dapat diketahui bahwa dakwah merupakan sebuah proses yang dilakukan secara terus menerus hingga dakwah masuk ke dalam relung-relung kehidupan, tak terkecuali dalam demokratisasi.

Dalam konteks negara demokrasi, meskipun terlahir dari Barat<sup>28</sup> esensinya tidak bertolak belakang dengan nilai Islam. Demokrasi dalam rumusan yang dikemukakan oleh pakar-pakar Islam terhimpun dalam satu kesatuan tiga unsur pokok, yaitu: (1) persamaan derajat, yang tertuang dalam surat al-Hujurat ayat 13 dan hadis Nabi yang artinya, “tidak ada kelebihan yang berkulit putih atas yang berkulit hitam, atau Arab atas non-Arab, demikian juga sebaliknya, kecuali atas ketakwaan mereka.” (2) tanggungjawab pribadi, yang termaktub dalam surat ath-Thur ayat 2 dan an-Najm ayat 38 serta hadis Nabi yang artinya “Pintalah apa yang engkau inginkan dari hartaku, tapi ketahuilah bahwa aku tidak dapat membantumu di sisi Allah.” dan (3) tegaknya hukum berdasarkan *syura* dan atas dasar perundangan yang jelas dan tanpa pandang bulu yang telah difirmankan dalam surat al-Maidah ayat 8. Adapun prinsip musyawarah dalam segala kehidupan tertuang dalam surat asy-Syura ayat 38, ath-Thalaq ayat 6, serta Ali-Imran ayat 159.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009).

<sup>28</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Alquran*, vol. 2 (Jakarta: Lentera hati, 2011).

<sup>29</sup> Ibid.

Robert W. Hefner, seorang Indonesianis, mengungkapkan bahwa sejarah Indonesia dan Islam menunjukkan terdapat sumber daya kultural yang besar bagi demokrasi. Namun hal ini tidak mudah untuk dicapai, Hefner mensyaratkan adanya pendidikan yang merata, perhimpunan warga yang bersemangat, kemakmuran ekonomi, dan kontrol terhadap kekuasaan negara. Sebaliknya, kondisi perbudakan, buta huruf masal akan menyulitkan realisasi demokratis. Pandangan Hefner ini berbeda dengan pandangan Samuel Huntington yang percaya bahwa terdapat ketidaksesuaian peradaban yang mendasar antara Islam dan demokrasi. Hefner meyakini bahwa tidak ada satu jalan menuju demokratisasi yang spesifik dan diciptakan untuk semua zaman dan bangsa, tidak juga yang diciptakan oleh Barat. Sehingga demokratisasi baru berhasil di mana ia secara aman didasarkan pada organisasi lokal dan makna-makna kultural.<sup>30</sup>

Hefner lebih lanjut mengemukakan bahwa tatanan keagamaan yang paling mendukung demokrasi adalah tatanan yang memperkuat dan melegitimasi pluralisme yang sama pentingnya dengan ajaran dalam Alquran (tiada paksaan dalam beragama). Demokrasi mensyaratkan adanya kesalehan dalam diri orang mukmin. Bahwa organisasi keagamaan tidak perlu memasuki ranah kenegaraan tetapi cukup menjadi *check and balance*, dari pada menjadi penopang kekuasaan monopoli dari negara. Para pemimpin agama juga dapat memperkuat demokrasi ketika para pemimpin agama menjaga jarak dengan hati-hati dan tidak pernah membiarkan diri mereka atau ideal mereka disubordinasikan terhadap tingkah penguasa atau program partai.<sup>31</sup>

Peran media dalam Islam mempunyai cikal bakal sejak zaman Rasulullah, yakni ketika Bilal bin Rabah R.A. mengumandangkan azan.<sup>32</sup> Contoh lain yang lebih modern tatkala Rasulullah melakukan ekspedisi surat untuk seruan Islam kepada para penguasa di tanah Arab, atau yang biasa disebut sebagai dakwah bil qalam. Media di sini

---

<sup>30</sup> Robert W Hefner, *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, Dan Demokrasi*, ed. Amiruddin Ashabuddin (Yogyakarta: LKiS, 2000).

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

menempati fungsinya sebagai alat atau saluran dalam proses berkomunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi.

Penggunaan media pada akhirnya berkaitan erat dengan pembentukan citra, tak terkecuali Islam. Hal ini secara mudah dapat kita lihat dalam peristiwa pasca pengeboman di gedung WTC Amerika Serikat. Sebuah contoh kompleks yang memerlihatkan bagaimana globalisasi dan media berdampak pada citra Islam, di mana citra Islam oleh pemberitaan Barat cenderung negatif. Sehingga diperlukan *counter* wacana untuk mencitrakan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Islam dalam raksasa jaringan telekomunikasi global berada dalam posisi pinggiran. Kuantitas umat yang begitu besar nyatanya belum mampu membangkitkan media-media Islam. Sebagai contoh di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam nyatanya sistem ekonomi dan sosial budaya dikuasai oleh kelompok-kelompok sekuler. Ekonomi media massa Islam sangat lemah sehingga ketika lahir media bernaifaskan Islam hanya berumur pendek seperti Harian Panji Masyarakat, bahkan di antara media surat kabar *mainstream* hanya Harian Republika satu-satunya media Islam. Khalayak (pembaca, pemirsa, pendengar) Islam kurang meminati media Islam, sehingga rendahnya rating untuk televisi, tirus untuk surat kabar cenderung rendah yang mengakibatkan tidak tertariknya pengiklan. Di media, Islam hanya semarak ketika Bulan Ramadhan saja, di mana berbagai jenis media berlomba-lomba untuk menarik khalayak dan tak terkecuali para pengiklan serta pemodal yang tak ketinggalan bermain di sana. Selain Bulan Ramadhan, Islam di media hanya berada dalam wacana sekitar radikalisme, alat dalam perpolitikan, isu kemiskinan dan degradasi moral pejabat yang notabenenya Islam.

Dakwah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bayanuni mencakup tiga hal, yakni penyampaian ajaran Islam untuk seluruh manusia (*tabligh*), memahami (*ta'lim / tazkiyah*), hingga penerapan (*tathbiq*) dalam masalah-masalah kehidupan.<sup>33</sup> Berdasarkan pengertian dakwah di atas, dapat diketahui dakwah bisa masuk dalam berbagai situasi dan kondisi, sebab ia diharapkan dapat menjawab masalah-

---

<sup>33</sup> Muhammad Abu Al-Fath, *Al-Bayanuni, Al-Madkhal Ila 'Ilm Al-Da'Wah* (Beirut: al Risalah, 1993).

masalah kehidupan. Dakwah masa kini berada dalam era globalisasi dengan kondisi demokrasi dan kebebasan media. Oleh karena itu, mau tidak mau dakwah harus mengisi situasi tersebut.

Dakwah dan fenomena globalisasi dihadapkan dengan dunia tanpa sekat, di mana segala sesuatu terhubung dan nilai-nilai bisa bercampur dengan mudah. Sebagai contoh, fenomena pacaran di kalangan generasi muda—bahkan generasi tua-, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Oleh karena itu, kita harus bisa melindungi nilai-nilai dan budaya yang kita anut. Hal ini tentunya bisa dimulai dari peran keluarga. *Tabligh* dan *ta'lim* dalam keluarga harus lebih dahulu selesai sebelum anak-anak menerima nilai-nilai lain yang berasal dari luar. Sebagaimana yang diterapkan negara Bhutan, yang tetap menganjurkan generasi mudanya menggunakan baju tradisional negara demi membatasi masuknya nilai modernitas yang berasal dari luar.

Dakwah terhadap demokrasi khususnya di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan moralitas. Mengutip apa yang disebut Latif.<sup>34</sup> bahwa esensi demokrasi: pemberdayaan rakyat (*popular empowerment*) dan pertanggungjawaban sistemik (*systemic responsiveness*). Maka di sini penyelenggara negara harus bisa mempertanggungjawabkan amanah yang diterima. Terlebih sekarang ini kebobrokan semakin menggejala di berbagai aspek kehidupan.

Adapun peluang dakwah di era kebebasan media yaitu *pertama*, harus bisa mengisi kesempatan kebebasan informasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Meningkatkan kreativitas dalam membuat konten-konten Islami yang lebih menarik dan mencerminkan *Islam rahmatan lil 'alamin*. *Ke dua*, Ikut serta menjadi pemain dalam pembentukan opini publik. Meskipun kapitalisme global masih tidak terkalahkan, tetapi sebagaimana yang dikemukakan Hefner, hal itu bisa ditangkis dengan penguatan lokal-kultural dan basis-basis organisasi sosial keagamaan yang *concern* untuk kesejahteraan masyarakat, serta fungsinya sebagai *check* terhadap kekuasaan. *Ke tiga*, pendidikan umat

---

<sup>34</sup> Latif Yudhi, "Kratos Minus Demos," in *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan Dari Bawah* (Jakarta: Bakumsu dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

Islam yang berbasis moralitas orang muslim. mereka harus setia pada ajaran agama dan konsisten terhadap idealitas agama. *Ke empat*, pendayagunaan secara maksimal sumber kapitalisme Islam—zakat—dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat.

## Kesimpulan

Posisi dakwah Islam saat ini masih berada terpinggirkan dalam arus globalisasi yang berdampak pada demokratisasi dan kebebasan media. Peranan yang dimainkan belum bisa menjadi *subyek* dan memainkan peran utama, sebab kiblat dunia masih dipegang oleh Barat. Meskipun Islam di pentas global menjadi obyek yang sangat diperhitungkan, bahkan ditakutkan dan diperhitungkan namun cenderung dikucilkan seperti keberadaan Iran. Peluang besar di era globalisasi ini dengan tanpa menentang arus tetapi mengikutinya sebagai pemain. Terdapat empat peluang yang bisa digunakan dalam mengisi dakwah Islam di era globalisasi media yaitu *pertama*, harus bisa mengisi kesempatan kebebasan media informasi yang sedang berlangsung sekarang ini dengan meningkatkan kreativitas dalam membuat konten-konten Islami yang lebih menarik dan mencerminkan *Islam rahmatan lil ‘alamin*. *Ke dua*, Ikut serta menjadi pemain dalam pembentukan opini publik. *Ke tiga*, pendidikan umat Islam yang berbasis moralitas orang muslim. mereka harus setia pada ajaran agama dan konsisten terhadap idealitas agama. *Ke empat*, pendayagunaan secara maksimal sumber kapitalisme Islam -zakat-, dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat.

## Daftar Pustaka

- Al-Fath, Muhammad Abu. *Al-Bayanuni, Al-Madkhal Ila 'Ilm Al-Da'Wab*. Beirut: al Risalah, 1993.
- Anany, E.G. Mc. "Globalization and the Media: The Debate Continues." *Communication Research Trends* 21, no. 4 (2002).
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.

- Chinnamai, S. "Effects of Globalization on Education and Culture." In *ICDE International Conference*. New Delhi: ICDE, 2005.
- Fakih, Mansour. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Giddens, Anthony. *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Hefner, Robert W. *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme, Dan Demokrasi*. Edited by Amiruddin Ashabuddin. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Ibrahim, Idi Subandy, and Bakharuddin Ali akhmad. "Komunikasi Dan Komodifikasi: Mengkaji Media Dan Budaya Dalam." In *Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- JPPN. "Inilah Ranking Kebebasan Pers Indonesia Dari 180 Negara." *Jpnn.Com*, 2015. <https://www.jpnn.com/news/inilah-ranking-kebebasan-pers-indonesia-dari-180-negara>.
- Martha, J., A Bainus, and R.D Haryadi. "Bhutan: Globalisasi, Demokrasi, Dan Tantangan Terhadap Kebahagiaan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 10, no. 2 (2014).
- Muis, Andi Abdul. *Komunikasi Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Panuju, Redi. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Rantanen, Terhi. *Theorizing Media and Globalization*. London: SAGE Publications, 2005.
- Rianto, P. "Globalisasi Media Dan Transformasi Politik Internasional." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 (June 2008).
- Rivers, William L., T. Peterson, and J.W. Hensen. *Media Massa Dan Masyarakat Modern (Mass Media and Modern Society)*. Edited by Haris Munandar and Dudy Priatna. Jakarta: Kencana, 2014.



- Samekto, FX. Aji. “Mengungkap Relasi Kapitalisme, Demokrasi, Dan Globalisasi: Kajian Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).
- Shihab, Quraisy. *Membumikan Alquran*. Vol. 2. Jakarta: Lentera hati, 2011.
- Siregar. *Demokratisasi Media Dan Perubahan Peran Negara: Media, Jurnalisme, Dan Budaya Popular*. Yogyakarta: Prodi Komunikasi UII dan UII Press, 2008.
- Syah, Sirikit. *Membincang Pers, Kepala Negara, Dan Etika Media*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Taher, Elza Peldi, ed. “Kata Pengantar.” In *Demokratisasi Politik, Budaya, Dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1994.
- Yudhi, Latif. “Kratos Minus Demos.” In *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia, Catatan Dari Bawah*. Jakarta: Bakumsu dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

